

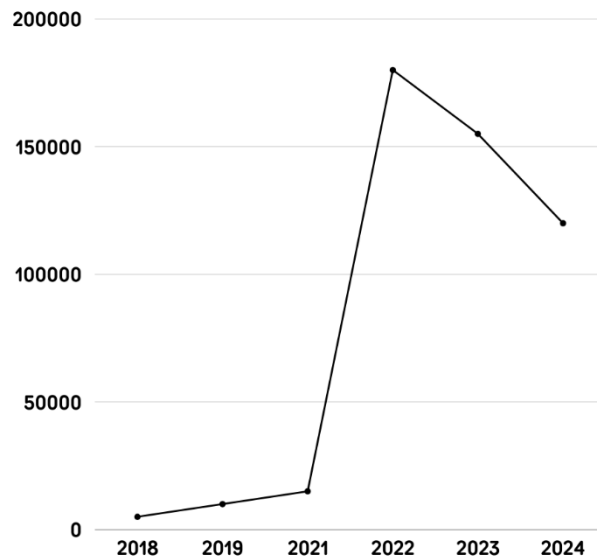
BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan telah diumumkan oleh WHO sebagai pandemi kesehatan masyarakat global, dengan 1 hingga 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik ataupun seksual di dalam hidup mereka (United Nations, 2024). Kekerasan terhadap perempuan telah terjadi di semua negara hal tersebut yang menjadikannya sebagai isu global. Permasalahan kekerasan berbasis gender juga terjadi di Ukraina yang semakin meningkat semenjak terjadinya konflik dengan Rusia. Hubungan antara Rusia dan Ukraina telah lama memburuk ketika Rusia berencana untuk menginvasi Ukraina. Sejak tahun 2022 meledaknya konflik antara kedua negara tersebut memberikan dampak yang besar bagi Ukraina yaitu menimbulkan dampak kemanusiaan yang berat seperti, kerusakan infrastruktur, krisis pengungsian, serta terjadinya ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan juga politik. Lebih dari sekitar 2.000 perempuan dipastikan tewas dalam serangan yang menghancurkan rumah hingga bangunan sipil di Ukraina (un women, 2023). Menurut *Office of The High Commissioner For Human Rights* (OHCHR), konflik bersenjata di Ukraina telah menimbulkan dampak serius terhadap perempuan. Lebih dari 2.000 perempuan tercatat tewas akibat serangan yang menargetkan pemukiman dan infrastruktur. Dampak tersebut kemungkinan lebih besar, mengingat Perempuan menyumbang hampir 40% lebih dari 21.000 korban sipil pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dampak konflik ini tidak netral gender.

Angka ini memperkuat klaim bahwa perempuan terdampak oleh kekerasan perang, meskipun mereka bukan pihak yang terlibat dalam peperangan (un women, 2023).



Gambar 1.1 Jumlah kasus KBG tahun 2018-2024

Sumber: Dirangkum dan dituliskan ulang oleh penulis

Pada periode 2018 hingga 2021 jumlah kasus KBG cenderung meningkat secara bertahap, namun masih berada pada Tingkat yang relative rendah dan stabil. Perubahan yang signifikan terlihat pada tahun 2022 ketika jumlah kasus KBG melonjak tajam akibat adanya invasi Rusia ke Ukraina (Human Right First, 2023). Namun pada tahun berikutnya, 2023 dan 2024 jumlah kasus tersebut mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa penurunan yang terjadi adanya pemulihan secara perlahan. Kondisi ini menegaskan bahwa eskalasi KBG bersifat struktural dan masih berkelanjutan.

Krisis yang sedang berlangsung tersebut menunjukkan bahwa memburuknya ketimpangan gender, terutama bagi perempuan yang menghadapi bentuk diskriminasi langsung seperti, mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh militer Rusia, serta mengalami serangan seksual saat terjadinya penahanan (UN Women, 2024). Selain itu, perempuan menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, seperti perempuan yang berasal dari kelompok minoritas yang menghadapi tantangan khusus dalam mengakses dukungan kemanusiaan dan memiliki kebutuhan perlindungan yang meningkat.

Negara	Peringkat Global	Skor Global Gender Gap Index 2022
Ukraina	81	0.710
Afghanistan	146	0.435
Iran	143	0.576
Kongo	144	0.575

Tabel 1. 1 Perbandingan Global Gender Gap Index 2022

Sumber: ditulis ulang oleh penulis

Pada tabel diatas dapat dijelaskan perbandingan antara Ukraina dan ketiga negara yang pada tahun 2022. Berdasarkan data *Global Gender Gap Index 2022*, Ukraina menempati peringkat 81 dengan skor 0,710 yang menunjukkan tingkat kesenjangan gender relatif lebih baik dibandingkan Afghanistan, Iran, dan Kongo (World Economic Forum, 2022). Namun demikian, keempat negara sama-sama berada dalam konteks konflik bersenjata atau krisis keamanan berat pada tahun 2022, Ukraina diakibatkan oleh invasi Rusia, Afghanistan diakibatkan oleh pasca

kembalinya rezim Taliban, Iran dalam situasi ketegangan internal dan represi domestik, serta Kongo dengan konflik bersenjata yang terus berlangsung. Secara umum ini juga memperburuk kerentanan perempuan dan mempersempit ruang perlindungan hak-hak gender.

Kondisi tersebut membuat implementasi pada suatu program akan begitu sulit untuk dilakukan secara sistematis. Dengan menghadapi konflik bersenjata yang berkelanjutan ketiga negara tersebut Berbeda dengan Ukraina, negara tersebut tidak menempati posisi peringkat yang terburuk dalam indeks kesenjangan gender global. Sebelum invasi Rusia, Ukraina telah mempunyai kerangka kebijakan perlindungan perempuan, termasuk *National Action Plan on Women, Peace and Security*. Ketika perang telah berlangsung pada tahun 2022 institusi pemerintahan Ukraina masih tetap berfungsi, sehingga membuka ruang untuk organisasi internasional seperti UN Women untuk mengintervensi, dan juga tetap memperkuat kapasitas negara Ukraina dalam perlindungan Perempuan (World Economic Forum, 2022). Selain itu, Ukraina menjadi satu-satunya negara kawasan Eropa yang belum stabil dalam menyelesaikan KBG di negaranya dan menjadi negara dengan konflik bersenjata di Kawasan Eropa.

Ukraine - Global Gender Gap Index		
Date	Gender Gap Ranking	Gender Gap Index
2024	63°	0.7220
2023	66°	0.7140
2022	81°	0.7070
2021	74°	0.7140
2020	59°	0.7210
2018	65°	0.7080
2017	61°	0.7050
2016	69°	0.6998
2015	67°	0.7020
2014	56°	0.7056
2013	64°	0.6935
2012	64°	0.6894
2011	64°	0.6861
2010	63°	0.6869
2009	61°	0.6896
2008	62°	0.6856
2007	57°	0.6790
2006	48°	0.6797

Gambar 2 Total Global Gender Gap Index Ukraina

Sumber: World Economic Forum, 2024

Berdasarkan data Global Gender Gap Index tersebut perkembangan kesetaraan gender di Ukraina menunjukkan dinamika yang fluktuatif pada periode 2006 hingga 2024. Nilai indeks berada pada rentang 0,67 hingga 0,72 yang berarti Ukraina telah menutup sekitar 67-72 persen kesenjangan gender sejak tahun 2006 hingga 2024. Meskipun fluktuasi kecil masih terlihat, tren umum menunjukkan adanya peningkatan perlahan dalam capaian kesetaraan gender, terutama setelah tahun 2021 (World Economic Forum, 2022). Peringkat Ukraina di tingkat global juga mengalami dinamika naik turun yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 dan 2020, Ukraina mampu menempati posisi yang lebih baik dibanding tahun-tahun yang lain, yakni berada kisaran peringkat 50-60 dunia. Akan tetapi, pada tahun 2022 posisinya sempat mengalami penurunan hingga peringkat ke-81 (World Economic

Forum, 2022). Setelah itu kembali membaik lagi pada tahun-tahun berikutnya. Data tersebut menjelaskan bahwa Ukraina terus memperbaiki capaian kesetaraan gender, namun masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisinya di tingkat internasional.

Walaupun dalam konflik ini laki-laki juga terdampak oleh adanya persyaratan wajib militer, dampak multisektoral dari krisis ini berdampak dengan tidak proporsional terhadap Perempuan. Dalam kasus ini, perempuan adalah kelompok mayoritas yang menghadapi risiko keselamatan dan perlindungan yang jauh lebih tinggi (UN Women, 2022). Dampak tersebut memiliki perbedaan gender yang begitu signifikan. Perempuan menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan berbasis gender. Dalam situasi tersebut akses mereka terhadap layanan kesehatan, layanan perlindungan masih sulit, serta mengalami kehilangan sumber mata pencaharian yang lebih besar. Kondisi ini dapat menegaskan bahwa konflik tidak hanya memengaruhi keamanan negara, tetapi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan gender yang telah ada di negara tersebut. Karena invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina, perempuan di Ukraina menghadapi tingkat kemiskinan, pengungsian, hingga kekerasan berbasis gender yang lebih tinggi dan mayoritas tersebut membutuhkan bantuan kemanusiaan. Analisis gender cepat yang dilakukan oleh *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) menunjukkan bahwa perempuan juga terpengaruh oleh krisis secara tidak seimbang dalam berbagai hal lainnya. Dalam situasi ancaman keamanan yang terus menerus, perempuan dan anak perempuan menghadapi peningkatan kasus kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan dari pasangan, pelecehan seksual,

serta kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik. Penurunan kondisi sosial ekonomi semakin memperparah ancaman ini, meningkatkan jumlah eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya (UN Women, 2022).

Menurut data OECD Sejak eskalasi konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas di tahun 2022 terjadi penurunan dana dari internasional untuk kesetaraan gender. Dana untuk kesetaraan gender di Ukraina di tahun 2021 sekitar US\$1,3 miliar melonjak di tahun 2022 menjadi \$18,9 miliar (United Nations Ukraine, 2024). Pada saat yang bersamaan, 90 persen atau senilai \$17,1 miliar dari pendanaan yang diberikan tidak mencakup untuk tujuan kesetaraan gender, hanya sekitar \$44 juta yang dialokasikan untuk upaya dalam memajukan kesetaraan gender sebagai tujuan utama (United Nations Ukraine, 2024). Ukraina telah mendapatkan kemajuan yang terlihat signifikan dalam menyelaraskan kesetaraan gender ke dalam rencana pemulihan dan rekonstruksinya yang telah dilakukan sejak dimulainya *Ukraine Recovery Conference* (URC) yang berlangsung di Lugano tahun 2022. Hasil dari konferensi ini membuat inisiatif utama yang meliputi pembentukan platform untuk pengarusutamaan gender serta pemulihan inklusif.

UN Women telah beroperasi di Ukraina sejak tahun 1999 untuk membantu negara tersebut memenuhi komitmennya pada kesetaraan gender dan mewujudkan kemajuan bagi perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2018 UN Women mendirikan kantor di negara tersebut (UN Women, 2022). Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, UN Women berkomitmen untuk memberikan bantuan di berbagai tempat prioritas di Ukraina, dengan melaksanakan tiga mandatnya yang meliputi dukungan normatif, koordinasi sistem PBB, dan kegiatan operasional untuk

mendorong tindakan yang mendesak dan berkelanjutan demi mencapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan.

Pada konferensi pemulihan Ukraina pada 12 Juni 2024 yang berlangsung di Berlin, dibuat sebuah program yaitu *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* diluncurkan oleh UN Women yang bekerja sama dengan *Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of Germany* (BMZ) serta kabinet Menteri Ukraina (United Nations Ukraine, 2024). Aliansi yang dibuat ini mempunyai tujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi inti dari upaya untuk pemulihan dan pembangunan Ukraina yang bersifat responsif gender dan inklusifitas. Sejak berjalannya aliansi ini UN Women telah mengumpulkan berbagai lembaga hingga pemerintah seperti lembaga keuangan internasional, badan PBB, organisasi masyarakat sipil khususnya organisasi perempuan (UN Women, 2024).

Kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan telah diakui secara global sebagai prioritas untuk mencapai suatu Pembangunan berkelanjutan bagi semua. Pemerintah hingga mitra kerja sama sudah berkomitmen secara internasional untuk memajukan kesetaraan gender melalui kerja sama pembangunan, respon kemanusiaan, dan upaya perdamaian dan keamanan. Melalui program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* ini berfokus dengan sejumlah prioritas seperti memberikan perlindungan serta pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan, meringankan permasalahan kekerasan berbasis gender di Ukraina, dan juga memberikan dukungan dari segi ekonomi yang menjadikan perempuan sebagai agen dalam pemulihan tingkat komunitas.

Syva Octaviani dan Nur Azizah (2023) dalam tulisannya yang berjudul “*Implementasi Program Anti-dowry UN Women dalam Upayanya Mengatasi Permasalahan Dowry Death, India (2016-2021)*”. Artikel tersebut membahas tentang program *anti-dowry* yang dijalankan oleh UN Women dalam upayanya untuk mengatasi permasalahan *dowry* di India. Banyaknya kasus permintaan dowry oleh pengantin pria yang ternyata disalahgunakan dan menyebabkan perempuan di India mengalami diskriminasi hingga berujung kematian akibat dowry atau biasa disebut *dowry death* (Octaviani & Azizah, 2023). Artikel yang ditulis tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya dari dunia internasional terutama UN Women beserta LSM *Cooperative and Assistance for Relief Everywhere (CARE)* menerapkan program anti-dowry.

Tulisan berikutnya di tulis oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, dan Mohd. Agoes Afiya (2022) yang berjudul “*Efektivitas UN Women Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan Sustainable Development Goals (ASDG’s)*”, dalam artikel tersebut berbicara mengenai program serta upaya yang dilakukan oleh UN Women untuk meningkatkan gender equality di Afghanistan dengan menjelaskan kasus diskriminasi kepada Perempuan di negara tersebut dan juga menjelaskan efektivitas UN Women di Afghanistan melalui *Afghanistan Sustainable Development Goals (A-SDG’s)* yang berasal dari *Sustainable Development Goals (SDG’s)* yang dimana agenda yang digunakan sebagai kerangka pembangunan selama 30 tahun terhitung dari tahun 2016 (Shamimi, Rijal, & Afiya, 2022). Penelitian tersebut menggunakan teori efektivitas organisasi internasional.

Tulisan yang ditulis oleh Natasya Aulia Putri, M. Arsy Ash Ashiddiqy, dan Dani Kurniawansyah (2023) dengan judul “*PERAN UN WOMEN TERHADAP DISKRIMINASI PEREMPUAN KORBAN ISIS DI IRAK*”. Artikel tersebut menjelaskan mengenai ketimpangan gender yang terjadi di Irak, dan bagaimana organisasi internasional menempatkan dirinya sebagai aktor hubungan internasional di dalam permasalahan diskriminasi Perempuan korban ISIS di Irak, yang dimana UN Women berperan sebagai OI untuk mengatasi permasalahan diskriminasi di Irak (Putri, Ashiddiqy, & Kurniawansyah, 2023). Penelitian ini menggunakan teori milik Clive Archer tentang peran organisasi internasional. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, banyak yang dilakukan oleh UN Women ketika menjalankan perannya seperti, peran instrumen yang dimana UN Women membuat suatu perjanjian kerjasama dengan aktor yang lain, arena dimana UN Women menjadi sarana untuk berkumpulnya para aktor yang lainnya, dan UN Women sebagai aktor dengan menjalankan programnya tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Dari ketiga literatur review yang penulis temukan, bahwa penelitian penulis dengan ketiga mempunyai kesamaan dalam organisasi internasional yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan gender. UN Women sebagai organisasi internasional yang menangani permasalahan tersebut menjadi peran yang paling krusial dengan menjalankan suatu program hingga memberikan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan berbasis gender di suatu negara. Walaupun berfokus pada penyelesaian kekerasan berbasis gender, akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian penulis dan ketiga penelitian yang telah

penulis jabarkan. Penulis menggunakan teori dan program yang berbeda dari ketiga penelitian yang telah penulis jabarkan.

Sehingga dapat diketahui adanya *research gap* yang ditemukan yaitu, Ukraina adalah satu-satunya negara berkonflik yang menyediakan kombinasi perang aktif, kapasitas negara yang memadai, komitmen gender sebelum invasi, serta ruang kolaborasi bagi UN Women dan membuat suatu program baru yaitu *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* yang didirikan pada tahun 2022. Sehingga dapat dilihat bahwa belum adanya penelitian yang membahas terkait program tersebut. Selain itu, penulis juga menggunakan teori implementasi organisasi internasional dalam menganalisis cara kerja dari UN Women. Terjadinya kekerasan berbasis gender di Ukraina maka penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana implementasi program tersebut dapat memberikan bantuan-bantuan untuk perempuan dan anak-anak perempuan di Ukraina.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah penulis jabarkan, penulis ingin mencari tahu Bagaimana implementasi UN Women melalui program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* untuk Ukraina 2022-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini secara umum yaitu untuk memberikan informasi bagi masyarakat umum dalam bentuk karya tulis ilmiah atau penelitian ilmiah. Kemudian, penelitian ini juga memiliki tujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam

mendapatkan gelar strata 1 dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian yang penulis ambil juga mempunyai tujuan khusus yang sesuai dengan pengerjaan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis tulis, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi UN Women Dalam Menangani Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan di Ukraina Melalui Program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* untuk Ukraina Tahun 2022-2025.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 *Gender mainstreaming*

Konsep gender mainstreaming diperkenalkan pertama kali pada The Beijing Declaration and Platform for Action 1995, yang menegaskan bahwa “pemerintah dan juga aktor lain harus mempromosikan kebijakan perspektif gender ke dalam semua kebijakan dan program sebelum adanya keputusan yang diambil dan di analisis untuk melihat dampak terhadap perempuan dan laki-laki (UN Women, 2015). Konsep tersebut dikembangkan karena melihat adanya keprihatinan feminis pada konteks pembangunan, sehingga karena hal tersebut memasukkan kesetaraan gender dalam proses dan juga tujuan dari pembangunan. Dalam pandangan feminisme, menurut Kabonesa *gender mainstreaming* merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam persiapan, perancangan, penerapan, monitoring dan evaluasi suatu

kebijakan, peraturan pelaksanaan dan program pembiayaan, dengan tujuan untuk mendukung kesetaraan antara laki-laki maupun Perempuan, serta menghapus adanya diskriminasi.

Menurut Jacqui True *gender mainstreaming* adalah strategi institusional yang bertujuan untuk menggabungkan sudut yang bertujuan untuk menggabungkan sudut pandang gender ke dalam semua proses kebijakan, program, dan praktik organisasi internasional, sehingga analisis tentang dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki dilakukan sebelum ada keputusan yang diambil. Dalam konteks ini, ketimpangan gender tidak dipandang sebagai isu sektoral yang terpisah, melainkan sebagai akibat dari hubungan kekuasaan yang terinstitusionalisasi dalam struktur birokrasi, norma-norma kebijakan, dan praktik organisasi internasional (True, 2014). Gender mainstreaming juga tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah program yang ditujukan untuk perempuan, tetapi juga memerlukan transformasi dalam proses internal organisasi, termasuk cara mendefinisikan masalah, merumuskan indikator kebijakan, dan menetapkan prioritas program. Oleh karena itu, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak hanya diukur dari hasil kebijakan, tetapi juga dari seberapa jauh organisasi internasional dapat mengubah proses pengambilan keputusan yang dulunya netral terhadap gender tetapi sebenarnya memperkuat ketimpangan gender.

Pada konteks organisasi internasional, True juga menekankan bahwa gender mainstreaming bekerja dalam dua ranah politik yang saling berkaitan, politik institusional dan diskursif. Pada politik institusional mengacu pada dinamika birokrasi, distribusi kekuasaan, serta mekanisme yang membentuk penerapan

gender mainstreaming. Sedangkan pada politik diskursif hal ini berkaitan dengan dibentuknya lewat bahasa kebijakan dan praktik dari organisasi (True, 2014). Pada politik institusional pada dinamika birokrasi, memberikan letak isu gender sebagai unit khusus yang tidak boleh di campurkan dengan isu-isu lainnya. Hal ini akan menciptakan kepatuhan untuk menyelesaikan permasalahan gender yang ada di suatu negara.

1.4.2 Implementasi Organisasi Internasional

International Organization and Implementation merupakan implementasi dan suatu kewajiban yang menghasilkan dua variabel yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengaskan kekuasaan organisasi internasional selama fase implementasi (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Pada pendekatan implementasi kebijakan sebuah organisasi internasional terbagi menjadi tiga yaitu, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*. Secara luas, implementasi merujuk kepada penerjemah perjanjian internasional yang telah disepakati ke dalam suatu kebijakan yang konkret dan diwujudkan kedalam bentuk pengesahan dari suatu aturan ataupun peraturan. Dalam teori ini Joachim membagi ke tiga pendekatan yaitu, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach* (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

	<i>Enforcement approach</i>	<i>Management approach</i>	<i>Normative approach</i>
Resources	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Naming and shaming</i>, i.e., judging on the basis of state reporting, expert committees, inspections or NGO reports • <i>Sanctions</i>, e.g. economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Monitoring</i> on the basis of state reporting, expert committees, inspections, or NGO reports • <i>Capacity building and problem solving</i> through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authority and legitimacy</i>

Gambar 3 Tiga Pendekatan Teori Organisasi Internasional

Sumber: Joachim, Reinalda, Verbeek, 2007

Implementasi Organisasi Internasional melalui *Enforcement Approach* Pendekatan ini dibuat bersifat memaksa terhadap negara-negara yang sudah menyetujui suatu perjanjian internasional. Pendekatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan pengaruh dan memastikan peran negara dengan melakukan pemantauan pada pelaksanaan perjanjian, pemberian sanksi, serta mencegah negara ketika melakukan pelanggaran. Pada pendekatan ini lebih menekankan adanya hukuman atau sanksi bagi negara yang melanggar suatu perjanjian internasional yang telah disepakati bersama. Implementasi Organisasi Internasional melalui *Management Approach*. Dalam pendekatan ini menjelaskan bahwa cara kerja yang tidak memaksa dan lebih terbuka. Pendekatan ini sarannya untuk memecahkan permasalahan, meningkatkan kapasitas, dan juga meningkatkan transparansi dalam perjanjian internasional. Pada pendekatan ini dibagi menjadi tiga tahapan yang

dilakukan yaitu, *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

Monitoring atau pemantauan merupakan salah satu cara yang digunakan di dalam pendekatan manajemen. Dapat dilakukan melalui laporan ataupun dengan pendataan dari negara terhadap organisasi internasional, pembuatan komite atau komunitas tertentu oleh organisasi internasional. Selain itu, organisasi internasional juga dapat menerima laporan dari organisasi masyarakat *Civil Society Organization* (CSO) (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Dalam kasus lain, perjanjian yang telah dibuat dapat membentuk komite khusus untuk menilai laporan dan kemudian memberi tahu negara-negara apa yang harus dilakukan. Selanjutnya pada tahapan *Capacity Building*, cara yang dilakukan oleh organisasi internasional dalam menjalankan peran penting pada proses implementasi, karena organisasi internasional dapat memberikan bantuan kepada negara dengan mengembangkan kapasitas negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan (Haas, Keohane, & Levy, 1993). Suatu organisasi internasional pada *capacity building* memiliki tugas dengan meningkatkan dan juga mengembangkan kemampuan negara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

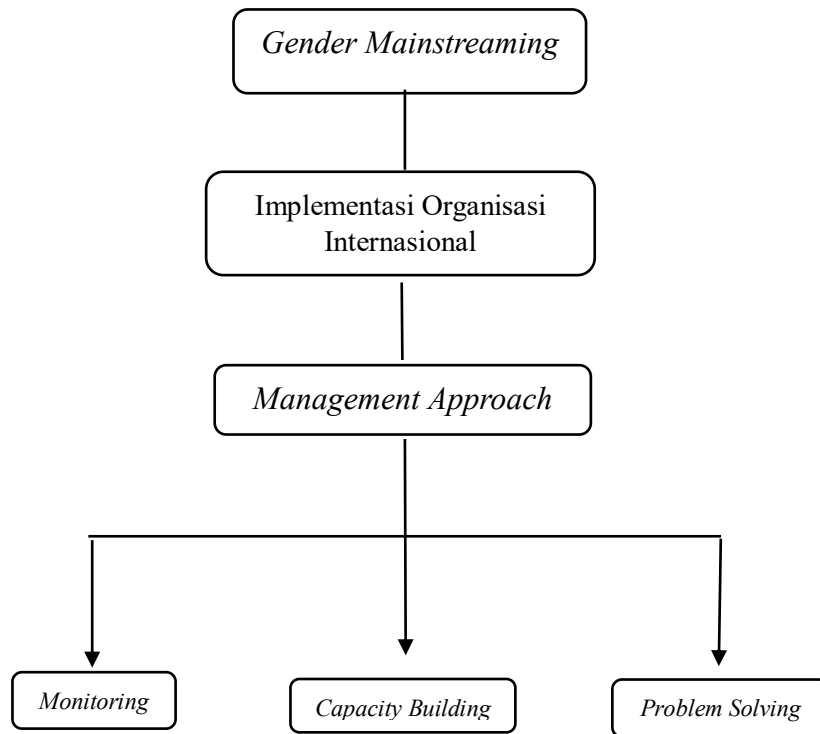
Serta pada tahapan yang terakhir yaitu, tahapan *Problem Solving*, pada cara ini berfokus pada bentuk pemecahan masalah dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh suatu negara. Proses ini lebih ditekankan dalam pendekatan manajemen dengan memberikan bantuan berupa bantuan teknis serta keuangan atau dengan memberikan penawaran dari ahli tertentu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007). Melalui proses ini organisasi

internasional dapat bekerja sama dengan lembaga juga organisasi lainnya yang saling berkaitan agar bantuan yang disalurkan dapat diberikan secara cepat dan tepat.

Implementasi Organisasi Internasional melalui *normative approach*. Pendekatan ini lebih mengedepankan kekuatan melalui norma dan juga nilai yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam memengaruhi kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional. *Normative approach* mempunyai tujuan untuk memberikan pengaruh terhadap kepatuhan suatu negara melalui argumen yang masuk akal dan berusaha untuk meyakinkan negara bahwa melaksanakan perjanjian internasional adalah tindakan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku secara global (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2007).

Diantara ketiga pendekatan yang telah di tuliskan yaitu, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach* penelitian ini lebih menggunakan *management approach* dalam menganalisis suatu implementasi dari program yang dijalankan oleh organisasi internasional pada suatu negara dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di negara tersebut. *Management approach* digunakan oleh organisasi internasional karena lebih bekerja secara aktif dalam mengimplementasikan programnya melalui *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving* untuk membantu menyelesaikan dan menangani permasalahannya.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.5 Sintesa Pemikiran

Berdasarkan bagan sintesa pemikiran diatas, penelitian ini memposisikan *gender mainstreaming* digunakan untuk memahami permasalahan ketimpangan gender yang dihadapi oleh Ukraina akibat konflik. Kemudian diimplementasikan organisasi internasional, khususnya UN Women dengan menjalankan kebijakan dan program konkret. Proses implementasi organisasi internasional tersebut dianalisis menggunakan *management approach*, yang diwujudkan melalui tiga tahapannya yaitu, *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*, sebagai mekanisme untuk membantu negara dalam merespon dan menangani permasalahan perlindungan perempuan.

1.6 Argumen Utama

UN Women dalam melakukan *monitoring* dengan mekanisme pelaporan bersama antar anggota aliansi dan pemerintah Ukraina melalui OECD DAC untuk menilai sejauh mana alokasi dana untuk proyek atau program pemulihan di Ukraina yang memajukan kesetaraan gender yang diberikan oleh ODA. Program tersebut dibuat bersama dengan pemerintah Ukraina dan anggota aliansi. Selain itu, melalui tahapan *capacity building* yang dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada pemerintah Ukraina tentang *budgeting responsive gender* melalui *U-Lead with Europe* dari inisiatif anggota aliansi dengan tujuan agar nantinya memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Agar institusi negara di tingkat lokal dapat merespon kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan responsif gender. Sektor swasta yang tergabung dalam aliansi turut berkontribusi melalui penerapan *Women's Empowerment Principles (WEPs)* yang berfungsi sebagai pedoman tata kelola perusahaan untuk memperkuat non-diskriminasi, memperluas akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan, serta mendorong kesetaraan dalam lingkungan kerja. Serta pada tahapan terakhir yaitu *problem solving*, UN Women menyalurkan bantuan keuangan melalui kerja sama dengan *Women's Peace and Humanitarian Fund (WPHF)* untuk merespons kebutuhan mendesak perempuan dan anak perempuan yang terdampak konflik, khususnya dalam pemulihan. UN Women juga berkolaborasi dengan lembaga internasional dan mitra pembangunan, seperti GIZ Ukraine yang menjalankan proyek *gender-responsive mental health and psychosocial support* dengan membuka layanan kesehatan mental, pelatihan tenaga kesehatan, dan pendekatan berbasis kebutuhan gender.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian yang penulis ambil, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini dapat digunakan untuk untuk meneliti suatu objek dengan teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013). Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk memahami dan juga menyelidiki masalah sosial dengan cara menggambarkan dan menganalisis fenomena dalam kerangka teoritis. Penelitian deskriptif ini membutuhkan data dan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti. Data serta pemahaman tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk studi literatur. Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan serta menjelaskan implementasi UN Women dalam menangani perlindungan perempuan dan anak perempuan di Ukraina melalui program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery for Ukraine* pada konflik Rusia-Ukraina tahun 2022-2025.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul implementasi UN Women dalam menangani perlindungan perempuan dan anak perempuan di Ukraina melalui program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* untuk Ukraina tahun 2022-2025, penelitian ini berfokus pada memahami dan menganalisis implementasi dari UN Women dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak perempuan melalui program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* di Ukraina akibat

konflik yang terjadi dengan Rusia periode tahun 2022-2025. Penulis mengambil tahun 2022 karena pada tahun tersebut meledaknya konflik antara Rusia dan Ukraina dan banyaknya kasus kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan hingga anak perempuan di Ukraina. Sehingga membuat organisasi internasional UN Women melakukan perlindungan dan pemberdayaan untuk para perempuan. Tahun 2025 yang penulis ambil merupakan batas penelitian yang masih berjalan saat ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Menggunakan Teknik tersebut dengan mengumpulkan data sekunder berupa berita, buku, jurnal, artikel, hingga web resmi. Studi Pustaka merupakan kegiatan dengan melakukan pengumpulan data Pustaka melalui membaca dan mencatat lalu mengolah bahan penelitian (Zed, 2004).

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terperinci tentang kondisi yang sebenarnya dari objek penelitian. Tujuan dari analisis data kualitatif untuk menyajikan penjelasan yang lebih sistematis dan realistis dalam menjalankan studi yang lebih rinci mengenai pertanyaan yang digunakan dalam penelitian melalui studi pustaka dan pengamatan terhadap sifat dan fenomena yang diteliti (Bungin, 2017). Penulis bertujuan untuk

melakukan eksplorasi yang mendalam terkait implementasi organisasi internasional dalam menangani perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di Ukraina melalui suatu program dengan menggunakan proses *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi UN WOMEN Dalam Menangani Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan di Ukraina Melalui Program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery for Ukraine: konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022-2024*” yang disusun oleh penulis dalam empat bab.

Bab 1: Pendahuluan, didalamnya mencakup pemaparan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, kerangka teoritis, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian. Serta metodologi penelitian yang terdiri atas tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Menjelaskan Implementasi program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* yang dibuat oleh UN Women untuk menangani perlindungan Perempuan di Ukraina melalui *monitoring*

Bab 3: Menjelaskan Implementasi program *Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery* yang dibuat oleh UN Women Women untuk menangani perlindungan Perempuan di Ukraina melalui *capacity building* dan *problem solving*.

Bab 4: penulis menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil proses penelitian. Penulis kemudian memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait dalam fokus penelitian ini serta sebagai saran untuk penelitian selanjutnya.